BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan pemaparan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto (2015:5) definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

> "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum".

Menurut Abdul Halim(2012:40) definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

> "Sistem Akuntansi Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan".

Berdasarkan kedua definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pengukuran, pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan pihak eksternal instansi pemerintah.

2.1.1.1 Basis Akuntansi Pemerintahan

Adapun basis akuntansi pemerintahan menurut Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto (2015:11) terdiri dari tiga basis yaitu:

1. Akuntansi berbasis kas (*Cash Based Accounting*)
   Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima atau dibayarkan (PSAP No. 1 Paragraf 8). Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi berbasis kas adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.
2. Akuntansi berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual Based Accounting*)
   Akuntansi berbasis kas menuju akrual merupakan proses transisi. Dengan basis ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis akrual (PP No. 24 Tahun 2005).
3. Akuntansi berbasis akrual (*Accrual Based Accounting*)
   Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PSAP No.1 Paragraf No 8). Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013), sistem akuntansi ini merupakan sistem yang paling *modest*. Keberhasilan Selandia Baru menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aset dan kewajiban. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan Laporan Keuangan Pemerintah menggunakan basis akrual.

2.1.1.2 Siklus Akuntansi

Menurut Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto (2015:6) mengemukakan bahwa:

"Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi".

Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Sugiri (2001) dalam Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto (2015:6) sebagai berikut:

1. Mendokumentansikan transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan ke dalam buku jurnal. Tahapan ini disebut menjurnal.
3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahapan ini disebut memposting atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkannya ke dalam neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan informasi yang paling terbaru *up to date*.
6. Menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan memindahkannya ke dalam neraca saldo setelahh disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan.
8. Menutup buku besar.

2.1.1.3 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:40), didalam akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Pengidentifikasian
   Pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.
2. Pengukuran
   Pengukuran transasksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi, semua transaksi di dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang.
3. Pencatatan
   Pencatatan transasksi ekonomi yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.
4. Pelaporan
   Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

2.1.2 Akuntabilitas Keuangan

Menurut Mahmudi (2010:23),definisi akuntabilitas adalah :

"Akuntantabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan

yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)".

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41), definisi akuntabilitas keuangan adalah :

"Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah".

2.1.2.1 Indikator Akuntabilitas Keuangan

Menurut Ihyaul Ulum (2010:40), indikator akuntabilitas meliputi :

1. Integritas Keuangan
   Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah, informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya pada saat disajikan.
2. Pengungkapan
   Konsep *full sidclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan disajikan sebagai kumpulan kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
   Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :
   - Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
   - Undang-undang Perbendaharaan Indonesia.
   - Undang-undang APBN.
   - Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
   - Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
   - Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD.
   - Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

2.1.3 Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Simbolon (2006:3) definisi kinerja instansi pemerintah daerah adalah:

> "Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik".

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:17):

> "Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan, pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan".

2.1.3.1 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:21), aspek pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi hal-hal berikut :

1. Masukan (*Input*), adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output*, seperti sumber daya manusia (SDM), dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Proses (*Process*), adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah *input* menjadi *output*.
3. Keluaran (*Output*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* atau efek langsung dari *output* jangka menengah.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:27) menyatakan sebagai berikut:

> "Sistem dan prosedur yang dimaksudkan dalam bidang akuntansi disebut dengan sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Dalam lingkup pengelolaan keuangan negara atau penganggaran sektor publik, sistem

> akuntansi keuangan daerah diperlukan pada tahap pelaksanaan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah".

Teori diatas didukung oleh berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Wawan Sukmana (2009) yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh penelitian Mukmin dkk (2015) menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Pendapat serupa juga didukung oleh penelitian Novita Lerly Djiloy (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja SKPD pemerintah daerah kabupaten sigi.

2.2.2 Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

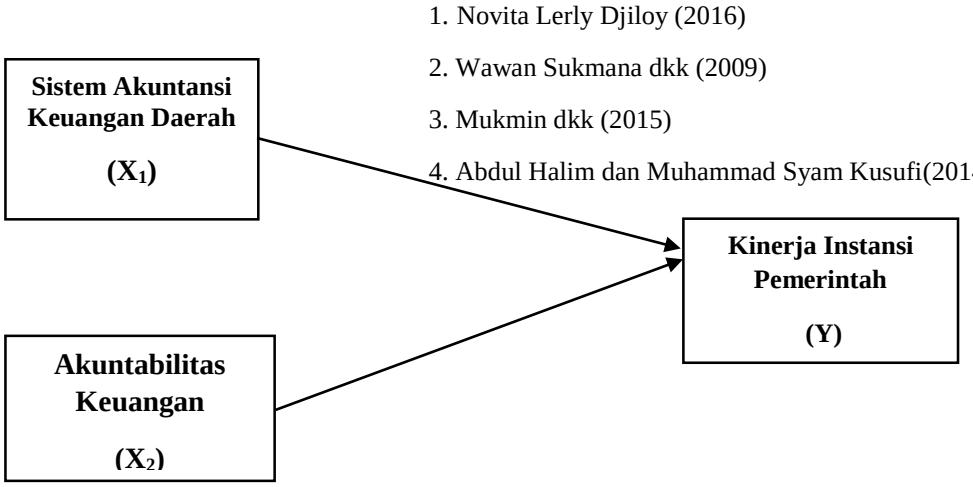
Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:124) :

> "Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan, tolak ukur kinerja tersebut berupa pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan, akuntabilitas keuangan yang baik akan berpengaruh pada penilaian kinerja di dalam instansi pemerintah untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik".

Teori diatas didukung oleh berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Lucy Auditya (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh penelitian Isty Riani (2015) menyatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Pendapat serupa juga didukung oleh penelitian Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015) menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka akan semakin meningkatkan kinerja. Akuntabilitas tinggi pada pengelolaan keuangan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang baik (Lucy Auditya,dkk, 2013).

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64), hipotesis didefinisikan sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H_1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

H_2 : Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah